

Manajemen Pengelolaan Obat

Upaya Peningkatan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial

Permasalahan	Upaya Tindak Lanjut
Perencanaan obat belum optimal dan ada yg belum dilakukan secara terpadu	Penguatan perencanaan kebutuhan obat
Permasalahan terkait pengadaan obat, pengiriman dan penerimaan, termasuk <i>performance</i> penyedia, masa kadaluarsa dan mutu obat	<ul style="list-style-type: none">▪ Koordinasi dengan Pusat, melalui skema penanganan keluhan▪ Pelaksanaan sampling dan uji mutu berkoordinasi dengan Badan POM
Kebutuhan obat dan BMHP yang tidak/belum ada NIE	<ul style="list-style-type: none">▪ Mendorong agar obat dan BMHP tersebut mendapatkan NIE
Kebijakan baru terkait penyediaan obat program kurang tersosialisasi	<ul style="list-style-type: none">▪ Desiminasi kebijakan baru secara berjenjang lebih awal

Upaya Peningkatan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Logistik Obat

Permasalahan	Upaya Tindak Lanjut
Tidak adanya standar honorarium dalam pemanfaatan DAK Non-fisik	Usulan perhitungan honorarium pengelola mempertimbangkan kebijakan daerah/UMR
Belum optimal aplikasi e-logistik (misal data item obat belum lengkap)	<i>E-logistic</i> terus disempurnakan sesuai kebutuhan
Integrasi data antara e-logistik dengan dengan sistem logistik pengelolaan obat daerah/mandiri	<ul style="list-style-type: none">• Integrasi system e-logistic dengan system informasi yang digunakan di daerah• Pendampingan teknis pelaksanaan integrasi sistem

Upaya Peningkatan Penggunaan E-Monev Katalog Obat dalam Menjamin Ketersediaan Obat

Permasalahan	Upaya Tindak Lanjut
Belum ada sinkronisasi data pada RKO e-Monev Katalog dan e-Fornas	Sinkronisasi data obat RKO e-Monev Katalog dengan e-Fornas
Informasi mengenai RKO sisipan yang belum tersosialisasi secara merata	Penyebaran informasi dilakukan melalui e-Monev (misal <i>running text</i> pada beranda e-Monev)
Aplikasi e-monev belum dimanfaatkan secara maksimal	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi kewajiban pemanfaatan aplikasi e-monev• Pendampingan teknis pemanfaatan aplikasi e-monev

Upaya Penerapan Pengelolaan Obat Satu Pintu pada Instalasi Farmasi terutama Pengelolaan Vaksin

Permasalahan	Upaya Tindak Lanjut
Kesiapan SDM dan sarana prasarana Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan SDM pengelola vaksin (misalnya dengan memindahkan tenaga pengelola vaksin ke Instalasi Farmasi)• Pemenuhan sarana prasarana dalam pengelolaan vaksin (DAK Fisik)
Belum optimal koordinasi antara PJ kefarmasian dan PJ program	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi aktif dengan pengelola program
Kapasitas tenaga kefarmasian pengelola vaksin yang kurang memadai	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas melalui pelatihan berjenjang maupun pendampingan teknis oleh Program (optimalisasi pemanfaatan dana DEKON)

Upaya Mendorong Bentuk Kelembagaan Instalasi Farmasi sebagai UPTD

Permasalahan	Upaya Tindak Lanjut
Kejelasan dasar hukum Instalasi Farmasi sebagai UPT Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Regulasi tentang Instalasi Farmasi• Advokasi kepada Kemendagri terkait UPT Daerah
Dukungan teknis terkait kajian pembentukan UPTD belum menyeluruh	Pendampingan teknis penyusunan kajian pembentukan UPTD

Dukungan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka Peningkatan Mutu Pengelolaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Permasalahan	Upaya Tindak Lanjut
Sarana dan prasarana pengelolaan obat belum sesuai Permenkes 75/2014	Usulan Menu DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar untuk pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan obat di Puskesmas (ruang farmasi dan ruang penyimpanan)
Ketersediaan tenaga kefarmasian masih kurang (Apt dan TTK}	Sosialisasi untuk peningkatan peminatan tenaga kefarmasian untuk mengikuti program NS (<i>team based</i> maupun individu)